

Aksi Kamis jam 16.00-17.00 di depan Istana Presiden (26 April 2007, Kamis ke XV1)

Sembilan Tahun Pengabaian Negara

Jelang dua hari sudah, May Day dan hari pendidikan diperingati. Di mana “keadilan” galak diteriakan untuk sebuah perbaikan bagi nasib anak bangsa. Kini hari-hari di bulan Mei kembali mengajak kita untuk bersama merenung dan berteriak lantang untuk sebuah keadilan atas tragedi Trisakti, pada tanggal 12 Mei 1998 empat mahasiswa meninggal diterjang peluru panas mematikan, ratusan mahasiswa luka-luka.oleh karena sikap lantang mereka terhadap penindasan rezim Suharto yang tak berkesudahan sepanjang 32 Tahun, saat itu reformasi menjadi tuntutan serentak mahasiswa di Indonesia. Tak cukup dengan menembaki aksi-aksi mahasiswa dan masyarakat, Dua hari berikutnya, 13, 14, 15 Mei terjadi tindak amuk yang hebat, Indonesia hangus terbakar. Penjarahan dan perusakan terjadi di mana-mana, ribuan orang meninggal, ratusan luka-luka. Sebuah tragedi yang tak mungkin cukup dilakukan oleh tangan-tangan rakyat yang tak punya kuasa apapun. Dua peristiwa di atas, terus menghantarkan kata reformasi menuju DPR, sampai dengan puncaknya pada 21 Mei Suharto menyatakan turun dari kekuasaannya. Selanjutnya, peristiwa berdarah kembali terjadi, pada 8-14 November merenggut 18 korban jiwa dan ratusan luka-luka (peristiwa Semanggi I). dan pada September 1999, kembali meletus peristiwa Semanggi II, sebelas orang meninggal.

Peristiwa di atas adalah kronologis sejarah yang mestinya tidak hanya kita ingat, tetapi juga harus kita pertanyakan, di mana tanggung jawab negara terhadap pelanggaran HAM yang terjadi pada tragedi Trisakti Semanggi I-II (TSS), Tragedi Mei 1998. dan mengapa sampai saat ini, Pemerintah tidak juga meminta pertanggungjawaban rezim Suharto, atas segala peristiwa kekerasan yang terjadi. Rentetan proses reformasi di atas, mestinya membawa banyak perbaikan bagi bangsa ini. salah satu indikasi adanya perbaikan bagi masa depan bangsa ini adalah, bagaimana negara kita bisa mengungkapkan segala kesalahan dan pelanggaran HAM di masa lalu secara benar dan adil dalam prespektif supremasi hukum .

Yang terjadi, sampai dengan sembilan tahun reformasi, tak satupun keadilan menyentuh korban dan keluarga korban. Tragedi 1965, Tanjung Priok, Penculikan, Trisakti Semanggi I-II (TSS), Tragedi Mei. sebaliknya, alih-alih segala pelanggaran HAM di masa lalu dituntaskan, justru Munir dihilangkan, dan pemiskinan dalam segala bentuknya terus terjadi karena kebijakan yang tak pernah berpihak pada kaum miskin. Dan Suharto sampai saat ini *pun* tak tersentuh hukum. Di Momentum Mei yang syarat sejarah dan kekerasan ini, kami korban dan keluarga korban, kembali menyuarakan untuk bersama menuntut Negara untuk bertanggungjawab terhadap segala pelanggaran HAM yang terjadi. Dan semangat reformasi mestinya memberikn hak-hak bagi kaum miskin tercerabut sejak rezim orde baru hingga kini. Kemauan pemerintah untuk mengungkap dan memenuhi hak-hak rakyatnya adalah keharusan, sehingga transaksi politi di DPR dalam mengungkap kasus TSS dan Penculikan adalah penghianatan terhadap agenda reformasi.

Jaringan Rakyat Miskin Kota, Korban dan Keluarga Korban Pelanggaran HAM Tragedi TrisaktiSemanggi I dan II, Tragedi Mei 1998, Tragedi Penculikan Aktivis 1997/1998, Tragedi Tanjung Priok, Tragedi Talangsari Lampung1989, Tragedi 1965, Tragedi 27 Juli 1996, Pembunuhan Munir.